

PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK CALON PEMIMPIN DI ERA GLOBAL

H. Lukman Hakim

Staf Pengajar PPKn SMAN 6 Kabupaten Tangerang Banten

Email: hajitubaguslukman@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bentuk pendidikan yang mengembangkan sikap dan kemampuan warga negara baik dari aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter. Menghadapi arus globalisasi saat ini tentu membutuhkan persiapan secara maksimal untuk menyiapkan para generasi muda menjadi pemimpin masa depan yang profesional. Pemimpin di era global haruslah dapat melakukan perubahan secara terencana, memiliki suatu visi dan misi, memiliki pengaruh yang kuat guna mencapai tujuan bersama hingga mampu memotivasi rekan kerja di Organisasi. Untuk menjalankan roda kepemimpinan seorang pemimpin memerlukan suatu upaya yang strategis, sistematis dan efektif dalam melaksanakan suatu aktifitas untuk mencapai perubahan yang berkemajuan. Melalui pengembangan nilai-nilai kepemimpinan yang terdapat dalam materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat digunakan sebagai acuan bagi generasi muda penerus estafet kepemimpinan untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang handal, berkualitas dan berjiwa nasionalisme.

Kata Kunci: *Peran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pemimpin di Era global*

Abstract

Pancasila and Citizenship Education (PPKn) is a form of education that develops the attitudes and abilities of citizens both in terms of knowledge, attitudes, skills, and character. Facing the current flow of globalization certainly requires maximum preparation to prepare young people to become professional future leaders. Leaders in the global era must be able to make changes in a planned manner, have a vision and mission, have a strong influence in achieving common goals so as to be able to motivate colleagues in the Organization. To run the leadership wheel of a leader requires a strategic, systematic and effective effort in carrying out an activity to achieve progressive change. Through the development of leadership values contained in the Pancasila and Citizenship Education material can be used as a reference for the younger generation of successors in the leadership relay to prepare themselves to become reliable, quality and spirit of nationalism future leaders.

Keywords: *Role, Pancasila Education and Citizenship, Leader in the Global Era*

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi di dunia saat ini sangatlah cepat, baik dari aspek teknologi, pendidikan, politik, hukum, sosial, maupaun ekonomi. Tentu hal ini akan berakibat pada perubahan tatanan dunia. Disisi lain tatanan-tatanan baru yang menjadi alternatif dalam menciptakan sistem global yang lebih baik belum terbentuk. Seperti halnya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh globalisasi. Hal tersebut tentu akan mengakibatkan lemahnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Lemahnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan akan menimbulkan krisis moneter yang dampaknya tentu akan terasa dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus juga akan mempengaruhi karakter moral dan sikap perilaku manusia diberbagai belahan dunia seperti halnya negara berkembang yakni Indonesia (Syarbaini, 2006: 1)

Adanya krisis yang dialami negara tentu akan berndampak juga pada generasi muda. Muhammad Syaifudin & Agus Satmoko (2014: 670) menyampaikan bahwa “Generasi muda tentu akan menjadi generasi penurus bangsa untuk memimpin dan membawa perubahan bagi bangsanya ke arah yang lebih baik”. Oleh karena itu diperlukan adanya rekontruksi dalam dunia pendidikan untuk menyiapkan para pemimpin yang berjiwa nasionalis dan

berkarakter. Salah satu bentuk rekonstruksi pendidikan yang dapat diterapkan yakni melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini tentu mengingat bahwa materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan.

- 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- 2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya. (PP Nomor 32 Tahun 2013)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Ideologi Pancasila. Melalui pengembangan nilai-nilai Ideologi Pancasila yang disampaikan dalam pembelajaran PPKn akan menumbuhkan jiwa nasionalisme para pemimpin di era global. Kepemimpinan di era global haruslah dapat melakukan suatu perubahan yang terstruktur dan memiliki visi misi untuk mencapai tujuan, hingga dapat memotivasi rekan kerja dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tentu hal ini membutuhkan persiapan secara profesional dan personal untuk menjalankan tugas tersebut. Para generasi muda saat ini tentu harus disiapkan secara maksimal dalam setiap proses pembelajaran di lingkungan sekolah khususnya pada pelajaran PPKn yang mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai Ideologi Pancasila.

Model kepemimpinan yang mengembangkan nilai-nilai Pancasila tentu sangat dibutuhkan dalam menyiapkan pemimpin di era global. tentu hal ini mengingat bahwa nilai-nilai Pancasila kini telah tergerus oleh globalisasi yang selalu membawa karakter individualistik dan liberal. Para generasi muda saat ini belum mampu menjadikan Pancasila sebagai benteng untuk menahan banyaknya arus globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maraknya

pemimpin bangsa yang tersandung akan masalah korupsi dan kriminalitas tentu menjadi contoh lunturnya nilai-nilai Pancasila.

Pemimpin yang hanya sibuk mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya, bagaimana nilai cadangan devisa negara bertambah, eksploitasi sumber daya alam dan bagaimana memperoleh menjalankan serta mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Akan tetapi, tidak pernah lagi berpikir bagaimana membangun tatanan negara yang berasaskan nilai-nilai dan dasar-dasar Ideologi Pancasila. Perhatian pemimpin bangsa saat ini tentu tersita pada persoalan-persoalan teknis yang pada hakikatnya dapat diselesaikan secara mudah asal para pemimpin bangsa memiliki pendirian yang kokoh (Yeti Hidayatillah: 2014). Penumbuhan kembali nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran PPKn dalam upaya menyiapkan para calon pemimpin bangsa tentu menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hal ini dapat dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas bahkan Perguruan Tinggi. Dengan demikian para generasi muda dituntut untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sosial serta karakter warga negara.

KAJIAN PUSTAKA

1. Hakikat dan peran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan pada pembinaan sikap dan kemampuan bela negara. Jadi berbeda dengan wajib latih yang lebih ditekankan pada aspek fisik. Pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek kognitif dan afektif bela negara (Amin, 2010: 42). Kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam membangun kehidupan warga negara tentu menjadi tujuan umum dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini tentu sependapat dengan pendapatnya Heater (1999:114) bahwa.

Citizenship needs to be 'understood and studied as a mosaic of identities, duties and rights rather than a unitary concept' (Heater, 1999, p. 114). As such, citizenship education can be located within broadly defined parameters. In very broad terms, the task of citizenship education is to promote and encourage individuals to play a better part in our democracy

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentu menjadi proses penanaman kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini mata pelajaran PPKn memiliki peran yang strategis untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih beradab. Melalui pembinaan karakter pada masyarakat tentu akan mewujudkan kebiasaan baik, dan dari kebiasaan baik akan meleahirkan budaya yang baik pula dalam sistem pemerintahan. Dalam mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama oleh sebab itu diperlukan kerjasama dari berbagai komponen masyarakat.

Salah satu komponen penting dalam upaya membangun tatanan masyarakat yang berkemajuan tentu diperlukan adanya kerjasama dari bidang pendidikan, khususnya pendidikan formal, artinya bahwa pendidikan formal memiliki peran sekaligus tanggung jawab dalam membina karakter bangsa khususnya mata pelajaran PPKn yang secara umum memiliki tujuan sama dengan konsep membangun tatanan masyarakat yang berkemajuan yakni :

- (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab *kewarganegaraan (civic confidence, civic commitment, and civic responsibility)*;
- (2) pengetahuan kewarganegaraan;
- (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan *(civic competence and civic responsibility)* (PP Nomor 32 Tahun 2013)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam mengembangkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Adapun kedudukan dan fungsi tersebut di jalskan dalam Undang-undang Pasal 3 No. 20 tahun 2003 yakni :

- 1) PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic education di USA, citizenship education di UK, talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.
- 2) PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak

dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab

Menuru Rahmat (2009) banyak aspek kompetensi yang dapat diperoleh peserta didik dalam pembelajaran PPKn salah satunya pengetahuan warga negara (*civic knowledge*) menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan kompetensi watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) dapat dikatakan sebagai mureh dari pengembangan kedua kompetensi tersebut.

Komponen *Civic knowledge* pada mata pelajaran PPKn menggambarkan bahwa PPKn merupakan salah satu kajian keilmuan yang memiliki sifat multidisipliner hal ini berarti bahwa materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan, identitas nasional, pemeritahan berdasarkan hukum dan peradilan yang tidak memihak dan bebas, konstitusi serta nilai dan moral masyarakat. Sedangkan menurut Branson (1998: 87) aspek *civic knowledge* dalam pembelajaran PPKn diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yakni

- (1) apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan;
- (2) apa pondasi-pondasi sistem politik;
- (3) bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi;
- (4) hubungan antar suatu Negara dengan Negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional;
- (5) apa peran warganegara dalam demokrasi.

Pembelajaran PPKn yang dikembangkan saat ini tentu haruslah sesuai dengan lima hal terserbut untuk melahirkan warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang memadai guna menyiapkan para calon pemimpin di era globa yang mampu memberi perubahan yang lebih baik bagai negaranya dengan menerapkan nilai-nilai dan asas asas dasar negara.

Komponen aspek *civic skills* dalam pembelajaran PPKn menurut Quigley dalam Budimansyah 2010 secara konseptual memiliki karakteristik

kepribadian yang meliputi keadaban, tanggung jawab, disiplin, toleransi, terbuka, kesabaran, ketaatan, keterharuan, rendah hati serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Sedangkan komponen ketiga dalam pembelajaran PPKn berupa *civics disposition* aspek ini merupakan aspek yang paling substantif dan esensial. *Civics disposition* merupakan muara utama dari aspek *Civic knowledge* dan *civic skills* hal ini tentu sesuai dengan tujuan secara umum dari mata pelajaran PPKn yang cenderung menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan warga negara dalam upaya membangun tatanan kehidupan warga negara yang berlandaskan nilai-nilai dasar negara Pancasila.

Pembelajaran PPKn tentu memiliki peran yang sangat strategis untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang baik. Mempunyai kompetensi yang handal sesuai dengan asas dan nilai-nilai ideologi Pancasila. Para pemimpin bangsa yang dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya sudah dapat dipastikan tidak akan berbuat curang terhadap rakyatnya atau berbuat negatif seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian akan mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berkeadaban dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tentu dalam upaya mewujudkan aspek-aspek tersebut dibutuhkan pola Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang jauh lebih baik lagi baik dari kurikulum PPKn, model pembelajaran PPKn sampai dengan model penilaian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

2. Hakikat peran PPKn dan Pemimpin di Era Global

Dalam menjalankan organisasi, pemimpin menjadi penentu untuk mencapai tujuan dan perubahan yang lebih baik. Menurut Robert D Stuart (2002: 352) pemimpin adalah “seseorang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk dan juga mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan organisasi”. Sedangkan menurut Avolio dalam Hofmeyer, Sheingold, Klopper dan Warland (2015) menjelaskan bahwa “*Leadership can be defined in terms of traits, characteristics and behaviours that focus on a clear vision, action, modelling the way, ethical relationships, congruence, trustworthiness and collaboration*”. Kepemimpinan merupakan bentuk gambaran dari sifat, karakteristik dan perilaku yang fokus pada visi dan misi untuk mencapai tujuan organisasi

Pemimpin apresiatif tentu sangat di butuhkan untuk membangun tatanan dunia yang berkemajuan. Mengingat bahwa pengertian pemimpin apresiatif adalah “*The role of an appreciative leader is to be a catalyst of change and to look for and nurture the best in others*”. (Orr and Cleveland-Innes, 2015: 237). Pemimpin apresiatif akan mewujudkan sistem kepemimpinan yang mengembangkan nilai-nilai dasar organisasi. Dalam menjalankan kepemimpinannya, pemimpin tentu tidak bisa lepas akan konsep kepemimpinan yang dikembangkan. Di era saat ini pemimpin haruslah memiliki konsep kepemimpinan yang berorientasi pada perbuahan. Perubahan tersebut mencakup tujuh unsur yang esensial dalam kepemimpinan yakni perubahan dalam aspek pemimpin, pengaruh, pengikut, maksud, tujuan bersama, perubahan, dan tanggung jawab pribadi. Seorang pemimpin tentu haruslah memberi perubahan bagi organisasi yang dipimpinnya. Pengaruh kepemimpinan tentu juga menjadi unsur mendasar dalam memberikan perubahan.

Nanus & Dobbs (1999: 18) menemukan beberapa model khusus yang dapat digunakan untuk memahami peran pemimpin organisasi “ *inside the organization, outside organization, present operation, and on future possibilities*” para pemimpin haruslah memberi inspirasi, mendorong , menggerakkan dan memberdayakan anggotanya baik lingkup dalam organisasi, luar organisasi, operasional organisasi, maupun masa depan dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Keempat hal tersebut terdiri dari enam peran yang merupakan aktivitas pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya dan oleh Burt digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. peran gambar pemimpin organisasi non profit



Gambar tersebut tentu memberikan gambaran bahwa pemimpin dalam menjalankan organisasinya memiliki visi dan strategi yang sejalan dengan dasar negara Pancasila yakni seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik dan mengembangkan nilai-nilai dasar negara pada setiap visi dan misi. Pemimpin sebagai politisi dan juru bicara juga merupakan komponen kedua yang harus di kembangkan dalam model kepemimpinan di era global hal ini dapat diartikan bahwa pemimpin berperan sebagai penasihat, juru bicara dan sebagai negosiator terhadap bawahannya serta membangun hubungan dengan menggunakan sumber-sumber informasi. Ketiga, kepemimpinan sebagai seorang pelatih, yakni dalam diri pemimpin telah tertanam sifat membangun regu dan membina orang-orang di dalam organisasi dengan membangun kepercayaan yang menjadi pegangan. Nilai model kepemimpinan yang harus dibangun yakni pemimpin yang mampu menjadi agen perubahan dalam posisi di masa yang akan datang. Pemimpin ini memiliki pengaruh besar dalam mengambil keputusan untuk perubahan yang lebih baik lagi.

Pemimpin sebagai agen perubahan merupakan individu yang harus bertanggung jawab untuk mengubah sistem dan tingkah laku para anggotanya yang berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Ideologi Pancasila. Perubahan sukses dalam model kepemimpinan menurut Kurt Lewin dan Schein dalam Irawaty A. Kahar (2008: 25) haruslah mengikuti empat langkah yakni pertama, adanya keinginan untuk berubah dengan diawali adanya suatu kebutuhan berupa kekurangan-kekurangan dan ketidakpuasan selama ini. Kedua, pencarian yang meliputi memberikan dorongan untuk membujuk melalui beberapa pendekatan dan mengurangi berbagai bentuk ancaman-ancaman dan penolakan dengan demikian setiap individu dalam lingkungan organisasi siap untuk berubah. Ketiga, merubah perilaku secara individu terlebih dahulu kemudian anggota organisasi secara umum. Keempat merupakan langkah terakhir dalam upaya melakukan perubahan yang lebih baik pada organisasi yakni melalui pemantapan perubahan baru untuk membuat menjadi permanen.

Dalam upaya mewujudkan pemimpin di era global yang profesional dan berjiwa Pancasila tentu dibutuhkan peran dunia pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai dasar negara tersebut. Disinilah peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat di perlukan mengingat bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan materi pembelajaran wajib pada sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang menanamkan nilai-

nilai dasar negara Pancasila pada generasi penurus bangsa dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagaimana di rumuskan oleh para pemimpin bangsa merupakan pandangan hidup yang muncul dalam mengenali realitas sosial politik bangsa Indonesia. menurut Kaelan (2002) Pancasila adalah gambaran dari nilai-nilai jati diri bangsa yang dikembangkan dalam lima dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam lingkup pendidikan nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa mengalami banyak mengalami perubahan dari setiap razim yang berkuasa, baik dari orde lama samapai dengan masa reformasi. Namun demikian pembelajaran PPKn tentu menjadi alternatif utama dalam penanaman nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagai upaya menyiapkan para pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Sekaitan dengan pananaman nilai-nilai Pancasila melalu pendidikan Kewarganegaraan Afief Rahman, Duta UNESCO untuk Indonesia sekaligus pengamat pendidikan mengemukakan bahwa Penanaman Ideologi Pancasila saat ini dapat diterapkan malalui Pendidikan Kewarganegaraan (Anonym, 2011). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa agar ideologi terserbut mampu berjalan secara maksimal maka perlu memperhatikan tiga aspek yakni Kognitif (pengetahuan), efektif (sikap), dan psikokotor (pengalaman) begitu pula dengan penanaman ideologi Pancasila dalam pembelajaran PPKn ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara seimbang.

Dengan demikian ada beberapa nilai-nilai kepemimpinan pada pembelajaran PPKn yang dapat digunakan untuk membangun para calon pemimpin di era global yang berjiwa nasionalis. Menurut Winarno (2010) nilai-nilai terserbut dapat dilihat dari persektif teori pembelajaran PPKn yakni *fungsionalisme struktural* merupakan pengembangan nilai-nilai kehidupan sosial yang mengikat integrasi, titik temu, jati diri bangsa serta nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan. Sedangkan menurut White Hodgson dan Crainer (1997) ada lima jenis keterampilan yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran PPKn di sekolah-sekolah. Kelima terampilan terserbut harus dikorelasikan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila.

a. *Difficult Learning*

Proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai Pancasila merupakan kunci untuk mengatasi kegagalan dalam berorgansiasi.

Adanya proses pembelajaran yang rumit dan sulit tentu membutuhkan kreatifitas yang tinggi. Disinilah peran dari nilai pancasila yang dapat dikembangkan dalam pores pembelajaran untuk dapat mengidentifikasi apa yang belum mereka ketahui dan segala sesuatu yang belum didapatkan cara pemecahannya. Guru PPKn hendaklah menggambarkan nilai-nilai dasar negara Pancasila melalu beberapa contoh untuk membangun tugas dan fungsi dalam proses pembelajaran melalui penugasan yang mengarahkan pada aspek sikap, pengetahuan dan ketarampilan warga negara.

b. *Maximizing Energy*

Merupakan proses pembelajaran PPKn yang menekankan pada penyampain nilai-nilai pembelajaran secara maksimal baik

secara teori maupun praktek. Bagaimana nilai-nilai tersebut mampu di pahami para peserta didik kemudian dapat membangun keterampilan para calon pemimpin yang diinginkan pada organisasi masa depan yakni para pemimpin dengan kemampuan untuk mengeluarkan keputusan yang berlandaskan akan nilai-nilai dasar negara

c. *Resonant Simplicity*

Di era kecanggihan teknologi saat ini, informasi dan komunikasi yang efektif dan jelas merupakan suatu tuntutan. Melalui informasi berupa data maupun informasi tentu akan memberikan kemudahan bagi pendidik dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai dasar negara dalam proses pembelajaran. Dengan demikian para peserta didik akan dibekali setiap ilmu pengetahuan serta cara mengkomunikasikannya pada masyarakat umum. Pemimpinan masa depan haruslah benar-bener memastikan dengan terjun langsung ke lapangan baik dalam bentuk observasi maupun penelitian mengenai dinamika dan kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berujuk pada kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan.

d. *Multiple Focus*

Pendidik merupakan media dalam mentransformasikan nilai-nilai pembelajaran pada peserta didik. Tentu dalam menyampikan peroses pembelajaran di kelas pendidik harus fokus pada nilai pendidikan apa

yang akan dikembangkan dalam upaya membekali para calon pemimpin di era global. Untuk membangun nuansa fokus dalam peserta agar menjadi kebiasaan tentu membutuhkan strategi. Strategi ini lah yang tentu akan menjadi kebiasaan di masa yang akan datang. Kejelasan untuk mencapai tujuan akan didapatkan setelah melalui proses yang tidak terfokus. Dalam menyiapkan para pemimpin masa depan tentu hal ini akan sering sekali timbul. Adanya kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan teknik *persuasif* dan *advocay* dalam mempengaruhi anggota organisasi untuk dapat berpikir dan bertindak secara terfokus tentu sangat dituntut pada para calon pemimpin masa depan. Dengan demikian melalui proses pembelajaran PPKn yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan alternatif para peserta didik untuk membiasakan kebiasaan fokus dalam menjalankan tugas.

e. *Mastering Inner Sense*

Proses pembelajaran di kelas tentu menggunakan logika dan rasio dalam membuat prediksi-prediksi dalam menyelesaikan tugas. Pembelajaran PPKn akan menjadi media untuk melatih menggunakan kemampuan *inner sense* yang dimiliki dalam membuat keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan tersebut haruslah diselesaikan secara cepat, maka peran *innersense* sangatlah penting. Melalui kekuatan *innersense* seorang pemimpin akan berani mengambil resiko menempuh jalan keluar dari segala aturan. Disinilah peran materi PPKn dalam menumbuhkan kekuatan *innersense* para peserta didik sebagai bekal dalam membangun para calon pemimpin di era masa depan yang berani mengambil resiko, dan paham akan konsekuensi dengan tanggung dapat memberikan suatu solusi.

Dalam upaya mengembangkan nilai-nilai terampilan para calon pemimpin di era global tentu membutuhkan keteladanan. Hal ini tentu harus di gambarkan pula bagi para pendidik . Pendidikan merupakan contoh figur yang mentransformasikan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara tentu juga harus mencerahkan dan memberi perubahan ke arah yang lebih baik dalam membangun tatanan kehidupan yang berasaskan nilai-nilai dasar kehidupan. Sehingga akan terjalin ikatan antara pendidik dan peserta didik yang terorganisir secara berkala untuk mencapai tujuan bersama yakni

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

SIMPULAN

Era global merupakan era dimana perkembangan teknologi semakin berkembang, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu menjadi objek kajian yang menarik dalam upaya menyiapkan para pemimpin bangsa yang berkualitas dan profesional. Hal ini diperlukan peran serta dunia pendidikan dalam upaya menyiapkan para pemimpin tersebut yakni melalui materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pemimpin di era global haruslah memiliki sikap dan karakter warga negara yang berjiwa Nasionalisme, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar Pancasila akan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan haruslah menginternalisasikan nilai-nilai dasar negara Pancasila dalam setiap materi yang disampaikan. Terdapat lima nilai dasar yang bisa dijadikan rujukan para pendidik mata pelajaran PPKn dalam membangun para calon pemimpin masa depan yang memiliki jiwa Pancasilais dan nasionalis, kelima nilai tersebut yakni *Difficult Learning*, *Maximizing Energy*, *Resonant Simplicity*, *Multiple Focus* dan *Mastering Inner Sense*. Kelima nilai ini akan menjadi media dalam mentransformasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam diri peserta didik. Tentu hal ini juga membutuhkan peran dari seorang pendidik yang memberikan teladan secara langsung. Sehingga akan terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik yang sistematis, dalam upaya membentuk calon pemimpin bangsa yang profesional di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarbaini, Syahrial, dkk. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : UIEU – University Press
- Muhammad Syaifudin & Agus Satmoko. (2014). Kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Pembentukan Perilaku siswa SMA Negeri 19 Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Volume 2 Nomor 2.
- Yetti Hidayatillah. (2014). Urgensi Eksistensi Pancasila di Era Globalisasi (Studi Kritis Terhadap Persepsi Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep Tentang Eksistensi Pancasila). *Jurnal Pelopor Pendidikan* Volume 6, Nomer 2
- Amin, Z.L. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Heater, D. (1999). *What is citizenship education*. Cambridge: Polity Press
- Branson, Margaret Stimman. (1998). The Role of Civics education: A forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communicarian Network, Calabasas : CCE.
- Stuart, Robert D. and Barbara B. Morgan. (2002). *Library and information centre management*, USA: Library Unlimited.
- Orr T & Cleveland-Innes M. (2015). Appreciative Leadership: Supporting Education Innovation. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*. Volume 16, Number 4
- Nanus, Burt and Stephen M. Dobbs. (1999). *Leaders Make Different Strategies for Meeting the Non Profit Challenge*, San Francisco: Jossey bass.
- Hofmeyer A, Sheingold B.H, Klopper H.C, Warland J. (2015). Leadership In Learning And Teaching In Higher Education: Perspectives Of Academics In Non-Formal Leadership Roles. *Contemporary Issues In Education Research*. Volume 8, Number 3.
- Irawaty A. Kahar. (2008). Konsep Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi (organizational Change) pada Perpustakaan Perguruan tinggi. *Pustaka: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*. Vol.4, No.1, Juni 2008
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Anonym. 2011. “Cukupkan Pendidikan Kewarganegaraan?” Tersedia [Online] [http://edukasi.kompas.com/read/20Pendidikan Kewarganegaraan](http://edukasi.kompas.com/read/20Pendidikan+Kewarganegaraan)”. *Acta Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 (2) April 2009.

Winarno. 2010. “Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*)”. Makalah disajikan dalam Seminar di Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSII), 13 April 2010